



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. 021-5253004 / Fax. 021-5253048
Website: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.1-OT.03-697 9 November 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data Dukung Rencana Kerja
Tahunan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah
Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani serta Pelaporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Eselon I
 2. Para Kepala Kantor Wilayah
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di -

Tempat

Sehubungan dengan persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 serta menyusuli surat kami Nomor SEK.1.OT.03-002 tentang Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan agar masing-masing Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Mengunggah data dukung

a. Unit Eselon I:

1. Mengunggah data dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ke dalam aplikasi *Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)* untuk periode B12 serta B06 dan B09 yang masih terdapat **catatan**;
2. Mengunggah data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi ke dalam aplikasi *Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)* untuk periode B12 serta B09 dan B12 yang masih terdapat **catatan**;
3. Mengunggah data dukung Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ke dalam aplikasi *Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)* untuk periode B12.

b. Kantor Wilayah:

1. Mengunggah data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi kedalam aplikasi *Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)* untuk periode B12 serta B06 dan B12 yang masih terdapat **catatan**;
2. Mengunggah data dukung Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kedalam aplikasi *Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)* untuk periode B12 serta B06 dan B09 yang masih terdapat **catatan**.

B. Melakukan evaluasi reformasi birokrasi yang hasilnya diunggah ke dalam aplikasi *Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)* pada menu laporan reformasi birokrasi. Isi laporan dimaksud berdasar pada:

a. Unit Eselon I:

1. Rencana Kerja Tahunan periode triwulan III B12;
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) periode triwulan III B12;
3. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas periode triwulan III B12.

b. Kantor Wilayah:

1. Rencana Kerja Tahunan periode triwulan III B12;
2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas periode triwulan III B12.

C. Unit Eselon I menyampaikan laporan *Quick Win Road Map* Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 sesuai dengan Tata Naskah Dinas ke alamat email **perencanaanrb.setjen@gmail.com** (*Quick Win* terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk pengunggahan data dukung dan hasil evaluasi serta penyampaian laporan *Quick Win* dimaksud dilakukan selambat-lambatnya hari Jumat tanggal **3 Desember 2021**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ida Asep Somara , Bc.IP., S.Sos., M.M.
NIP. 19710102 199403 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran I

Nomor :

Tanggal :

QUICK WINS TAHUN 2021

NO	LAYANAN	KEGIATAN
1	FASILITATIF ADMINISTRATIF	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi penerapan layanan dan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, berupa:<ul style="list-style-type: none">• Penyempurnaan Pengajuan Biaya Mutasi Melalui SIMPEG• Pembayaran Tunjangan Kinerja Berdasar Kinerja Harian Melalui SIMPEG (Wilayah Indonesia Bagian Tengah)2. Penyederhanaan Birokrasi3. Penerapan <i>e-planning</i> agar tercapai efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Kemenkumham
2	IMIGRASI	<ol style="list-style-type: none">1. Implementasi kebijakan sistem penerbitan paspor elektronik secara sentralisasi/ regionalisasi/ desentralisasi/<i>hybrid</i>2. Reviu kebijakan penerbitan paspor elektronik polikarbonat pada 3 Kantor Imigrasi3. Implementasi kebijakan penerbitan paspor elektronik polikarbonat lanjutan pada 24 Kantor Imigrasi4. Penyusunan kebijakan sistem penerbitan paspor elektronik polikarbonat secara sentralisasi/ regionalisasi/ desentralisasi/<i>hybrid</i> di Perwakilan RI
3	PEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan layanan pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) berbasis Teknologi Informasi2. Pengembangan Layanan Pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi

NO	LAYANAN	KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pertukaran data pada Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada seluruh Lapas/Rutan yang menjadi target perluasan SPPT TI 4. Mengikutsertakan pendidikan formal bagi narapidana pada Universitas Terbuka 5. Pengintegrasian data Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dengan Pihak Terkait
4	ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1. Pembangunan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka Perencanaan Tindak Pidana Korporasi. (menjadi basis data pemilik manfaat atau beneficial ownership, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang)
5	KEKAYAAN INTELEKTUAL	1. Penyempurnaan IP Office Online Dalam Bentuk Pendaftaran Kekayaan Intelektual Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Agar Lebih Efektif Dan Efisien
6	PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1. Penerapan Teknologi Informasi dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin/kelompok orang miskin melalui Sidbankum
7	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan e-penerjemahan peraturan perundang-undangan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
8	LITBANG HUKUM DAN HAM	1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Litbang
10	PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas APIP Level 3 2. Satker WBK 6% dari yang diajukan 3. Maturitas SPIP Level 4